

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisa dan mencari tahu mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi kepada pihak *Emergency Contact* dalam praktik penyelenggaraan pinjaman uang *online* dan akibat hukum dari pencantuman nomor *Emergency Contact* tanpa persetujuan dalam perjanjian pinjaman uang *online*. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan keputusan dan regulasi dari OJK Pusat, dengan demikian OJK Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Emergency Contact* dalam praktik pinjaman uang *online* menyesuaikan dengan POJK dan sistem yang telah dibuat oleh OJK Pusat. OJK Provinsi Jambi bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab nya sesuai keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh OJK Pusat. Namun walaupun demikian, OJK Provinsi Jambi dalam menerima laporan atau aduan kemudian memproses serta memutuskan sanksi terhadap tindakan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan dan keputusan dari OJK Pusat. Masyarakat Kota Jambi yang pernah dijadikan sebagai *Emergency Contact* yang diambil sampel sebanyak 25 orang yang menjadi responden, telah memberikan penilaian terhadap kinerja OJK Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Emergency*

*Contact*. Mayoritas yaitu sebanyak 72% responden menyatakan peraturan dan regulasi yang diterapkan OJK Provinsi Jambi tidak menyediakan perlindungan hukum yang mumpuni kepada masyarakat yang disertakan sebagai *Emergency Contact* tanpa persetujuan dan 28% responden yang menilai bahwa OJK Provinsi Jambi telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap orang yang dijadikan *Emergency Contact* tanpa izin. Hal ini diperkuat dengan keterangan 4 orang responden yang melakukan laporan kepada OJK, bahwa laporan mengenai dirinya dijadikan *Emergency Contact* tidak mendapatkan tindak lanjut dan masih merasakan teror hingga debitur membayar utangnya. Perlindungan hukum terkait dengan pencantuman *Emergency Contact* tanpa izin baik melalui peraturan atau putusan dan tindak lanjut atas laporan melalui laman website OJK, cenderung belum cukup memberikan perlindungan hukum kepada para *Emergency Contact* yang dicantumkan tanpa izin. Hal ini dikarenakan selain tidak adanya peraturan OJK yang mengatur mengenai *Emergency Contact* hasil wawancara bahwa dari 4 responden yang melapor, seluruhnya menyatakan tidak mendapatkan tindak lanjut atas laporan yang dibuatnya.

2. Bagi *Emergency Contact* yang dicantumkan dalam perjanjian pinjaman *online* tanpa persetujuannya, terdapat dua langkah yang dapat diambil: melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menggugat perusahaan pinjaman *online* di pengadilan negeri. Pencantuman *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman *online* tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius privasi data pribadi. *Emergency Contact* dikategorikan sebagai data pribadi berdasarkan

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Maka perusahaan pinjaman *online* yang memakai atau memproses data pribadi tanpa persetujuan pemilik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Emergency Contact* yang tercantum dalam perjanjian pinjaman *online* harus menyetujui dan mengetahui isi perjanjian tersebut. Mencantumkan data pribadi seseorang sebagai *Emergency Contact* tanpa persetujuan orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perjanjian pinjaman uang *online* tersebut tidak bisa dianggap telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer, Pasal 1321 KUHPer, dan Pasal 1365 KUHPer. Konsekuensi hukum bagi perusahaan pinjaman *online* yang mencantumkan *Emergency Contact* tanpa persetujuan dapat berupa sanksi administratif, pembatalan perjanjian, dan sanksi ganti rugi atas kerugian materiil atau imateriil yang dialami *Emergency Contact*. Akibat hukum yang terealisasi oleh OJK berupa pemblokiran sistem 585 aplikasi pinjaman uang online yang bermasalah.

## **B. SARAN**

Seperti yang dikaji dalam pembahasan diatas, peraturan mengenai *Emergency Contact* sangat berpengaruh kepada perlindungan hukum yang didapat oleh *Emergency Contact*. Untuk itu perlu dilakukan beberapa penguatan regulasi terkait *Emergency Contact* serta peningkatan kinerja dari OJK. Penguatan regulasi terkait

*Emergency Contact*, penguatan tersebut berupa memperjelas definisi dan peran *Emergency Contact*, penguatan kewajiban penyelenggara pinjaman uang *online*, batasan penggunaan informasi, dan sanksi yang tegas. OJK juga diharapkan dapat melakukan peningkatan pengawasan berupa penyediaan layanan aduan, audit, dan inspeksi terhadap penyelenggara pinjaman uang *Online*. Untuk OJK Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi regulasi, meningkatkan literasi digital, dan peningkatan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Selain itu, OJK Provinsi Jambi juga diharapkan melakukan pemberdayaan kepada orang-orang yang dijadikan *Emergency Contact* dengan memberikan akses dan kontrol data mereka yang disimpan penyelenggara pinjaman *online*, kemudian berikan fasilitas atau mekanisme pencabutan persetujuan, dan memberikan informasi mengenai hak-hak *Emergency Contact*.

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meningkatkan kelengkapan dan kualitas hasil penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengumpulkan lebih banyak sumber dan referensi terkait dengan inklusi *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman uang *online*. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan dari dalam proses pengambilan dan pengumpulan data yang diperlukan serta mempersiapkan segala sesuatu dalam penelitian berikutnya agar penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, pragmatis dan sistematis. Peneliti selanjutnya diharap juga ditunjang dengan segala data dan informasi yang diperlukan. Sumber data yang diharap yaitu sumber yang lebih berkompeten dalam kajian mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap *Emergency Contact*.